ENERGY SHIFT INSTITUTE

Press Release

Batu Bara Indonesia Tidak Pernah Murah, Pemerintah Perlu Kaji Ulang Mekanisme DMO Batu Bara

Idham Muhammad Fachri & Hazel Ilango | November 2026

Jakarta, 24 November 2026 – Wacana menaikkan harga batu bara untuk kewajiban pasokan domestik (*Domestic Market Obligation*/DMO) dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural industri batu bara nasional di tengah perubahan pasar global. Pemerintah perlu meninjau ulang kerangka kebijakan batu bara DMO untuk sektor kelistrikan dibanding menyetujui tuntutan industri untuk menaikkan harga dari US$70 per ton menjadi sekitar US$80-90 per ton.

Analisis terbaru Energy Shift Institute (ESI) bertajuk '*Indonesia's coal DMO model becoming harder to sustain as global markets shift*' menunjukkan bahwa model penetapan DMO semakin menghadapi tantangan keberlanjutan seiring meningkatnya biaya produksi dan melemahnya profitabilitas ekspor. Pergeseran permintaaan dari China dan India yang selama ini menjadi negara utama tujuan ekspor, berpotensi semakin mengikis keuntungan ekspor yang selama ini menopang penjualan batu bara domestik dengan margin lebih rendah.

Idham Muhammad Fachri, *Senior Analyst* ESI mengatakan, analisis pada 11 perusahaan batu bara menunjukkan median biaya produksi meningkat dari US$37,8 per ton pada 2018 menjadi US$50,8 per ton pada 2025. Pada periode yang sama, median margin penjualan domestik anjlok dari US$10,9 per ton menjadi hanya US$0,6 per ton, sementara margin ekspor turun dari US$21,7 per ton menjadi US$ 13,6 per ton (Gambar 1).

Gambar 1. Median Biaya Produksi, Margin Domestik dan Ekspor dari 11 Perusahaan Batu bara (US$/ton)

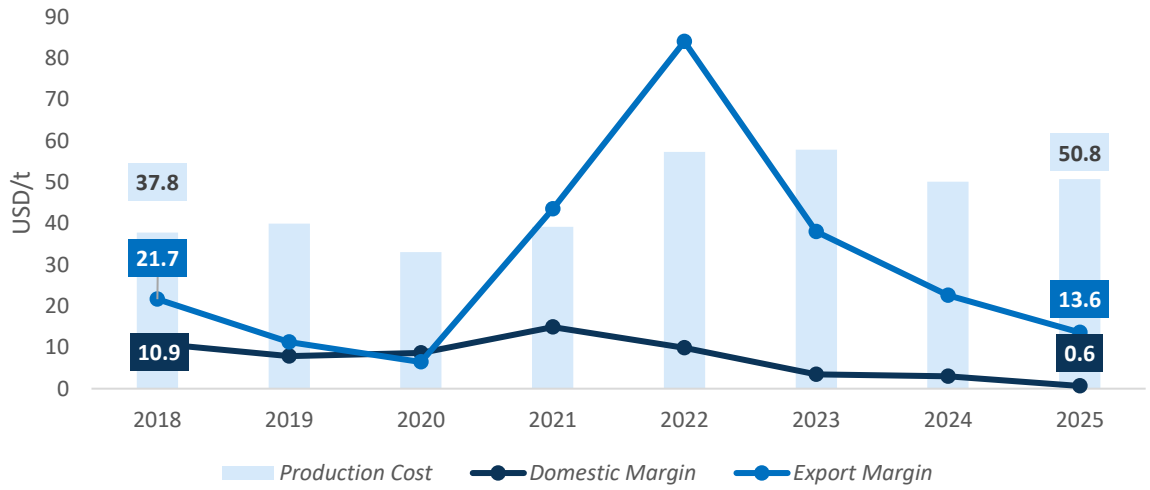

Sumber: Presentasi perusahaan, laporan tahunan, laporan keuangan, dan analisis ESI.

"Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan struktural dalam kerangka penetapan harga DMO. Berbeda dengan ekspor, harga DMO tidak otomatis mengikuti perubahan biaya produksi. Akibatnya kenaikan biaya produksi mempersempit margin produsen batu bara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa model DMO yang selama ini mengandalkan keuntungan ekspor untuk menopang penjualan domestik dengan harga lebih rendah semakin sulit dipertahankan," Idham mengatakan.

Namun, pilihan untuk menaikkan harga batu bara DMO tidak serta merta menghilangkan beban ekonomi. Hal tersebut justru berpotensi mengalihkan tekanan keuangan dari perusahaan batu bara pada PLN, konsumen listrik, dan pemerintah.

Hazel Ilango, *Principal and Coal Transition Lead* ESI mengatakan, bagi PLN, kenaikan harga batu bara berimbas pada meningkatnya biaya pengadaan dan pengeluaran operasional. Apabila peningkatan tersebut tidak diikuti oleh penyesuaian tarif listrik atau dukungan dari pemerintah, maka akan memperburuk likuiditas PLN. Ini terlihat dari kebutuhan modal kerja PLN melonjak dari Rp20,4 triliun pada 2024 menjadi Rp91,8 triliun pada 2025, didorong oleh kenaikan piutang pada pemerintah yang naik dari Rp43,3 triliun menjadi Rp110,7 triliun.

Sementara itu, ESI juga menyoroti keterbatasan ruang fiskal pemerintah untuk menyerap tambahan beban keuangan jika harga batu bara DMO dinaikkan. Dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat adanya defisit sebesar Rp670,3 triliun atau setara 2,81% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Secara nominal, defisit anggaran diproyeksi meningkat menjadi Rp734,3 triliun pada 2026. Kenaikan harga batu bara akan berimbas pada tambahan subsidi dan kompensasi yang memberikan tekanan terhadap anggaran negara.

“Pada akhirnya, apabila pemerintah tidak mampu memberikan tambahan subsidi atau kompensasi, PLN harus menanggung sendiri kenaikan biaya tersebut. Sementara itu, jika kenaikan biaya dibebankan kepada konsumen, keterjangkauan tarif listrik berisiko terganggu,” Hazel mengatakan.

Idham menambahkan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan DMO batu bara dengan mempertimbangkan berbagai tujuan dapat diakomodasi secara seimbang, terutama di tengah biaya produksi yang tinggi, prospek pendapatan ekspor yang tidak pasti, serta memastikan keandalan pasokan listrik nasional.

“Perdebatan mengenai DMO tidak lagi seharusnya hanya dibingkai sebagai pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya batas harga batu bara dinaikkan. Persoalan yang lebih besar adalah apakah Indonesia dapat terus mengandalkan harga batu bara yang diatur pemerintah untuk menjaga keterjangkauan listrik, sekaligus memastikan pasokan domestik tetap layak secara komersial dan membatasi risiko keuangan bagi PLN maupun pemerintah,” jelas Idham.

Senada, Dwi Wulan Ramadani, Policy Strategist Coordinator CERAH berpandangan evaluasi kebijakan DMO batu bara perlu diarahkan untuk mendorong transformasi sektor ketenagalistrikan nasional yang lebih berkelanjutan. Menurut Dwi, mempertahankan harga batu bara yang dibuat tetap murah dapat mempengaruhi daya saing sumber energi lain, termasuk energi baru dan terbarukan.

“Penting untuk dipahami bahwa evaluasi terhadap kebijakan DMO tidak semata-mata ditujukan untuk mempertahankan industri batu bara atau memastikan keberlanjutan model bisnisnya. Pemerintah perlu melihat persoalan ini dalam konteks sistem ketenagalistrikan yang lebih luas dan berkelanjutan. Indonesia perlu mengarahkan kebijakan ketenagalistrikannya pada pengembangan dan percepatan integrasi energi alternatif, serta memastikan implementasi tersebut berjalan secara terencana dan berkeadilan,” Dwi menegaskan.

****

Kontak Media
Idham Muhammad Fachri, Senior Analyst ESI
idham@energyshift.institute
Hazel Ilango, Principal & Coal Transition Lead ESI
hazel@energyshift.institute

Tentang Energy Shift Institute
Energy Shift Institute merupakan lembaga kajian independen di bidang pembiayaan energi yang menganalisis transisi energi Asia dari dalam kawasan. Lembaga ini bertujuan membantu menempatkan Asia sebagai pemimpin ekonomi masa depan dengan mendorong transisi energi yang lebih agresif melalui inovasi dalam pembiayaan strategis dan kebijakan, sekaligus mengeksplorasi peluang dan risiko teknologi.